

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

Kajian Pustaka

Pemberdayaan Masyarakat

1. Konsep Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan memberikan kerangka arahan mengenai ukuran kekuasaan (power) dan kemampuan (kapabilitas) yang melingkupi tingkat sosial, ekonomi, budaya, politik, dan kelembagaan.

Pemberdayaan mengarah pada kemampuan seseorang khususnya kelompok rentan dan lemah untuk. 1) memiliki pencapaian terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatnya pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang mereka butuhkan. 2) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Pemberdayaan terjemahan dari kata *empowerment* sedangkan meberdayakan dari kata *empower*. Menurut Menurut Merriam Webster dan Oxford English Dictionary dalam Graha, (2019, hlm. 122) kata *empower* mengandung dua pengertian, yaitu :

- 1) *to give power* atau *authority to* atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain.
- 2) *to give ability to* atau *enable* atau usaha untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.

Menurut Karl Marx dalam Graha (2019, hlm 122), pemberdayaan masyarakat adalah proses perjuangan kaum *powerless* untuk memperoleh surplus value sebagai hak normatifnya. Perjuangan memperoleh surplus *value* dilakukan melalui distribusi penguasaan faktor-faktor produksi. Dan perjuangan untuk mendistribusikan penguasaan faktor-faktor produksi harus dilakukan melalui perjuangan politik.

Sedangkan menurut Friedmann dalam Graha (2019, hlm.123), pemberdayaan harus datang dari rumah. Pemberdayaan rumah tangga adalah pemberdayaan yang mencakup aspek sosial, politik, dan psikologis. Pemberdayaan sosial mengacu pada bagaimana keluarga rentan mendapatkan akses ke informasi, pengetahuan, dan keterampilan, partisipasi dalam organisasi sosial, dan sumber daya keuangan. Pemberdayaan politik mengacu pada bagaimana rumah tangga rentan mengakses proses pengambilan keputusan publik yang akan berdampak pada masa depan. Pemberdayaan psikologis merupakan upaya membangun kepercayaan pada keluarga yang lemah.

Menurut Adisasmita (2006, hlm. 35) mengatakan, pemberdayaan masyarakat adalah untuk menggunakan dan mengelola sumber daya masyarakat pedesaan secara lebih efektif dan efisien, baik dari input atau aspek input, (personil, sumber daya, dan perencanaan dan teknologi), maupun dari aspek proses (pelaksanaan, pemantauan), atau aspek keluaran (pencapaian, tujuan, efektivitas dan efisiensi).

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah kemampuan seseorang untuk meningkatkan pendapatan dan memperoleh yang mereka inginkan baik kebutuhan jasa atau barang.

2. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan mengacu pada proses yang efisien untuk mengubah orang menjadi kondisi yang lebih baik dan mandiri. Menurut Sumardjo (2003) dalam Endah (2020, hlm. 137) mengatakan pemberdayaan masyarakat adalah proses. Pengembangan kemampuan masyarakat untuk mengakses peluang, motivasi, dan sumber daya, dengan sendirinya dan masyarakatnya. UU Desa No. 6, pasal 12 tahun 2014 menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat desa didasarkan pada kebijakan, program, kegiatan dan sifat masalah serta prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Berdasarkan pengertian diatas pemberdayaan masyarakat desa adalah mampu meningkatkan kemampuan seseorang dalam mengembangkan kemandirian,

pengetahuan, keterampilan, prilaku, kesadaran untuk memperoleh kehidupan yang baik, dan meningkatkan ekonomi keluarga.

3. Tahapan-tahapan Pemberdayaan

Tim Delivery dalam Mardikanto (2020, hlm. 125). Menawarkan tahapan-tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dimulai dari proses seleksi lokasi sampai dengan pemandirian masyarakat. Tahapan tersebut terdiri dari 4 tahap. Secara rinci msing-masing tahap tersebut adalah sebagai berikut:

1) Tahap Seleksi Lokasi/Wilayah

Seleksi wilayah dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga, pihak-pihak terkait dan masyarakat. Penetapan kriteria penting agar pemilihan lokasi dilakukan sebaik mungkin, sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat akan tercapai seperti yang diharapkan .

2) Tahap Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat

Sosialisasi, merupakan upaya mengkomunikasikan kegiatan untuk menciptakan diskusi dengan masyarakat. Melalui sosialisasi akan membantu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak terkait tentang program atau kegiatan yang akan dilakukan, sosialisasi sangat penting dalam pelaksanaan pemberdayaan, karena akan menentukan minat atau ketertarikan masyarakat untuk mengikuti program yang akan dilakukan.

3) Tahap Proses Pemberdayaan Masyarakat

Hakikat pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Dalam proses tersebut masyarakat bersama-sama melakukan hal berikut:

a. Mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan, serta peluang-peluangnya. Kegiatan ini dimaksudkan untuk masyarakat mampu dan percaya diri dalam mengidentifikasi serta menganalisa keadaanya. Baik potensi maupun permasalahannya. Pada tahapan ini diharapkan dapat memperoleh gambaran mengenai aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Proses ini meliputi :

- 1) Persiapan masyarakat dan aparaturnya untuk melakukan pertemuan awal dan teknis pelaksanaannya.
- 2) Persiapan penyelenggaraan pertemuan.

- 3) Pelaksanaan kajian dan penilaian keadaan.
 - 4) Pembahasan rencana kegiatan serta pengorganisasian pelaksanaan.
- b. Meyusun rencana kegiatan kelompok, berdasarkan hasil kajian, meliputi:
- 1) Memprioritaskan dan menganalisa masalah-masalah.
 - 2) Identifikasi alternatif pemecahan masalah yang terbaik.
 - 3) Identifikasi sumberdaya yang tersedia untuk pemecahan masalah.
 - 4) Pengembangan rencana kegiatan serta pengorganisasian pelaksanaannya.
- c. Menerapkan rencana kegiatan kelompok: rencana yang telah disusun bersama dengan dukungan fasilitas dari pendamping selanjutnya diimplementasikan dalam kegiatan yang konkrit dengan tetap memperhatikan realisasi dan rencana awal. Termasuk dalam kegiatan ini adalah, pemantauan pelaksanaan kemajuan kegiatan menjadi perhatian semua pihak. Selain itu dilakukan perbaikan jika diperlukan.
- d. Memantau proses dan hasil kegiatan secara terus menerus secara partisipatif (*participatory monitoring and evaluation/PME*). PME ini dilakukan secara mendalam pada semua tahapan pemberdayaan masyarakat agar prosesnya berjalan sesuai dengan tujuannya. PME adalah suatu proses penilaian, pengkajian kegiatan, baik prosesnya atau pelaksanaannya maupun hasil dan dampaknya agar kegiatan dapat disusun proses perbaikan kalau diperlukan.

4) Tahap Pemandirian Masyarakat

Perpegang pada prinsip pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk memandirikan masyarakat dan meningkatkan taraf hidupnya, maka arahemandirian masyarakat adalah berupa pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar benar-benar mampu mengelola sendiri kegiatannya.

Proses pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan faktor eksternal dan internal. Dalam hubungan ini, meskipun faktor internal sangat penting, akan tetapi kita juga harus memperhatikan faktor eksternal, proses pemberdayaan semestinya harus didampingi oleh fasilitator yang bersikap multidisiplin. Fasilitator ini merupakan pemantuan dari faktor eksternal agar masyarakat terus dibimbing sampai masyarakat itu mandiri.

Dalam tim fasilitator pendampingan pemberdayaan akan dikurangi dan di akhirnya berhenti. Peran fasilitator ini akan diganti oleh pengurus kelompok atau

pihak lain yang di anggap mampu oleh masyarakat. Berhentinya fasilitator tergantung kesepakatan bersama yang telah ditetapkan sejak awal program dengan warga.

Edi Suharto (2014:hlm.57) menyatakan pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dilakukan melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu:

1. Pemungkinan

Suatu proses untuk menciptakan kondisi atau suasana yang memungkinkan masyarakat dapat mengembangkan potensinya secara maksimal Pemungkinan juga berkaitan dengan program penyuluhan, dan sosialisasi dalam rangka mengembangkan inisiatif masyarakat. Menciptakan kondisi yang memungkinkan pemuda di desa jayaratu dapat berkembang lebih jauh dalam bidang ekonomi, adalah dengan menciptakan pemungkinan pemanfaatan potensi lokal,

2. Penguatan

Berkaitan dengan adanya pendidikan dan pelatihan untuk memperkuat kapasitas masyarakat yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang berkaitan dengan potensi lokal sosial sehingga dapat memecahkan masalah serta dapat berguna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

3. Perlindungan

Berkaitan dengan timbal balik antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal guna memperkuat kapasitas masyarakat. Upaya memperkuat kapasitas masyarakat juga dilakukan dengan memberikan kemudahan dalam perijinan lembaga kelompok dan lainnya. Memberikan perlindungan pada masyarakat, terutama kelompok lemah agar tidak menerima diskriminasi dari kelompok masyarakat yang lebih kuat.

4. Pemeliharaan

Pemeliharaan yang didalamnya mencakup proses pendampingan yaitu suatu proses agar terciptanya keadaan yang sesuai, terjaga, dan terpelihara, serta terjadinya keseimbangan peran maupun tanggung jawab antar berbagai kelompok di dalam masyarakat Pemeliharaan dalam masyarakat melalui peogram

BUMDESA rahayu dalam meningkatkan ekonomi keluarga adalah proses menjaga secara sustainable atau berkelanjutan terhadap pencapaian hasil pemberdayaan selama ini.

Menurut George R. Terry dalam Siagin (1989:hlm.50) dalam Kholilurrohman (2016:hlm.20-24) menyebutkan fungsi-fungsi pengelolaan atau manajemen, yaitu:

1. *Planning* (Perencanaan).

Menurut Handoko (1999:hlm.79) dalam Kholilurrohman (2016:hlm.21) hal awal yang harus dilakukan yaitu membuat *planing* atau rencana yang memberikan tujuan dan arah organisasi. Dalam perencanaan, memutuskan “apa yang harus dilakukan, kapan melakukannya, bagaimana melakukannya, dan siapa yang melakukannya”. Jadi, perencanaan adalah memilih dan merumuskan serangkaian kegiatan dan penentuan langkah selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa.

Kegiatan fungsi perencanaan yang dilakukan oleh perusahaan, organisasi, maupun program pemberdayaan yaitu (a) menentukan tujuan dan target; (b) Menyusun strategi untuk mencapai tujuan; (c) mencari dan menetapkan sumber daya yang diperlukan; (d) menetapkan indikator keberhasilan untuk melihat sejauh mana tingkat keberhasilan

2. *Oganizing* (pengorganisasian).

George R. Terry dalam hasibuan (2001:hlm.23) dalam Kholilurrohman (2016:hlm.22) menyatakan bahwa pengorganisasian adalah suatu langkah mengupayakan interaksi yang efektif antara seseorang dengan yang lainnya, sehingga mereka dapat saling bekerja sama secara efisien. Hasilnya dapat memberikan kepuasan pribadi terhadap tugas-tugas yang dilaksanakan dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan.

Langkah yang dapat diambil dalam pengorganisasian adalah perlu merancang dan mengembangkan suatu organisasi yang akan menjalankan program tersebut. Menurut Handoko (1999:hlm.24) dalam Kholilurrohman (2016:hlm.22) pengorganisasian adalah (a) menentukan sumber daya dan rencana kegiatan (b) penyusunan struktur organisasi, dalam hal ini mencakup rencana kerja untuk

membawa ke arah tujuan; (c) pembagian tugas dan tanggung jawab; (d) pelimpahan wewenang kepada individu- individu untuk melaksanakan tugasnya.

3. *Actuating*. (pengerakan).

Setelah rencana disusun dan ditetapkan, kemudian pembagian tugas untuk mencapai tujuan sudah dilaksanakan, maka tindakan selanjutnya dari pimpinan adalah mengkoordinir setiap anggota atau individu untuk segera melaksanakan kegiatan tersebut, sehingga benar benar dapat mencapai tujuan. Shaleh (1977:hlm.101) dalam Kholilurrohman (2016:hlm.23).

Kegiatan dalam fungsi penggerakan yang di laksanakan oleh organisasi yaitu, (a) menerapkan proses kepemimpinan, termasuk didalamnya memberikan bimbingan dan motivasi; (b) Memberikan arahan mengenai pekerjaan secara rutin, (c) Menjelaskan aturan dan kebijakan organisasi.

4. *Controlling* (pengawasan).

Menurut George R. Terry, pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses menentukan apa yang harus di capai yaitu standar, apa yang tengah dikerjakaan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan pembenahan, sehingga pelaksanaan dapat sesuai dengan rencana dan sesuai dengan standar (Kholilurrohman.2016:hlm.24).

Menurut Smith dalam Kholilurrohman (2016:hlm.24-25) kegiatan dalam fungsi pengawasan yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi yaitu, (a) Melakukan evaluasi secara menyeluruh, (b) Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi jika ditemukan penyimpangan, (c) Melakukan berbagai alternative solusi atas permasalahan yang ditemukan.

Berkaitan dengan sumber daya manusia, menurut Utama (2020:hlm.11-12) menjelaskan bahwa salah satu komponen sumber daya manusia yaitu fungsi manajemen yang terdiri dari a). perencanaan (*planning*), b). pengorganisasian (*organizing*), c) pengarahan (*directing*), dan pengendalian (*controlling*). Dengan demikian, untuk mencapai kemandirian masyarakat dalam organisasi perlu diterapkan fungsi manajemen dengan baik agar tujuan organisasi dapat tercapai dan menjadi organisasi yang unggul dan mampu bersaing. Hal ini pun sejalan dengan

Sukripiyanto dalam Jannah (2021: hlm.3) menjelaskan bahwa untuk mencapai keunggulan bersaing bagi sebuah organisasi industri diperlukan adanya kemampuan penerapan konsep dan fungsi manajemen *POAC* (*planning, organizing, actuating, controlling*) dalam mengelola organisasi. Maka, kaitannya dalam hal ini yaitu BUMDesa perlu menerapkan fungsi-fungsi manajemen dengan baik sehingga rencana dan tujuan dapat tercapai secara optimal dan mampu dalam meningkatkan ekonomi keluarga.

4. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Adapun tujuan dari pemberdayaan berdasar UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan Program Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dinyatakan bahwa “Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik”.

Sedangkan menurut Suharto (2010, hlm. 60) mengatakan bahwa tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat masyarakat yang lemah atau tidak memiliki ketidakberdayaan baik karena masalah internal (persepsi sendiri) maupun masalah eksternal (misalnya ditindas karena struktur sosial yang kurang adil).

5. Program Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta membantu kemajuan desa. Dalam program pemberdayaan masyarakat ini mencakup semua bidang dimulai dari pemerintahan, kelembagaan, kesehatan, ekonomi masyarakat, pendidikan, dan teknologi.

- 1) Program pemberdayaan pemerintah desa

Pemberdayaan dalam bidang pemerintahan ini mencakup semua sumberdaya yang ada mulai dari kepala desa, BPD, aparat desa. Bentuk pemberdayaan adalah pelatihan, penyusunan program desa, pelaksanaan program desa, dan peningkatan kualitas kerja pemerintah desa melalui pemberdayaan masyarakat, dibidang pemerintahan desa ini dapat meningkatkan kinerja pemerintahan desa dan dapat memajukan desa yang lebih baik.

2) Pemberdayaan masyarakat di bidang kelembagaan

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang kelembagaan ini mencakup semua kelembagaan masyarakat yang ada di desa. Pemberdayaan dalam bidang kelembagaan ini bertujuan untuk membangun lembaga yang terarah, produktif, dan terorganisir. Bentuk pemberdayaan ini diantaranya pelatihan, penyelenggaraan kegiatan, meningkatkan sarana prasarana. Dengan adanya pemberdayaan dibidang kelembagaan ini dapat meningkatkan kinerja lembaga dan dapat membantu desa dalam pembangunan.

3) Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan ini merupakan program pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Bentuk pemberdayaan dibidang kesehatan ini diantaranya peningkatan sarana prasarana kesehatan, promosi dan penyuluhan kegiatan kesehatan, dan membangun desa siaga. Dengan adanya pemberdayaan dalam bidang kesehatan ini masyarakat dapat hidup sehat, serta menyadarkan masyarakat agar hidup sehat.

4) Pemberdayaan di bidang ekonomi masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi masyarakat ini adalah program dari pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan desa dalam meningkatkan UKM, industri rumah tangga, BUMDESA, kelompok tani, pasar, serta menunjang ekonomi masyarakat lainnya. Bentuk dari pemberdayaan masyarakat ini berupa pelatihan, wokoops, pemodal/pemodal, bantuan alat produksi, peningkatan sarana prasarana, dengan demikian adanya pemberdayaan

masyarakat dalam bidang ekonomi diharapkan dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

5) Pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan.

Pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan merupakan program pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidikan masyarakat. Tujuan dari pemberdayaan pendidikan ini adalah untuk melatih tenaga pendidik, lembaga, guru, perbaikan sarana prasarana, pemberian beasiswa bagi siswa dan siswi yang berbakat. Penguatan pendidikan diharapkan dapat meningkatkan pendidikan masyarakat dan membangun masyarakat yang kompeten.

6) Pemberdayaan masyarakat dibidang teknologi

Program pemberdayaan masyarakat di bidang teknologi merupakan program pemerintah desa yang melacak apa yang terjadi, selain itu. Teknologi meningkatkan kinerja, membuatnya lebih cepat dan akurat. Format program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, pengemabangan teknologi, dan pemanfaatan teknologi dalam proses kinerja dan kehidupan masyarakat. Penguatan masyarakat di bidang teknologi diharapkan dapat membuat masyarakat lebih berdaya saing, mepermudah pkerjaan masyarakat, dan memudahkan masyarakat dalam bertukar dan menerima informasi.

6. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Strategi pemberdayaan masyarakat merupakan langkah atau jalan guna mempermudah pelaksanaan suatu program pemberdayaan masyarakat dalam mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Menurut Suharto (2010, hlm. 66) strategi pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra: (1) Aras mikro, pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management, crisis intervention.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang mempunyai tujuan yang jelas dan harus dicapai, maka dari itu setiap kegiatan pemberdayaan untuk mencapai tujuan tersebut harus mempunyai strategi agar tercapainya dan keberhasilan pemberdayaan tersebut, strategi tersebut bisa diartikan dalam kehidupan sehari-hari yaitu langkah-langkah, atau tindakan tertentu yang dilaksanakan demi tercapainya suatu tujuan pemberdayaan masyarakat.

Tentang hal ini, Mardikanto (2020, hlm. 167) mengatakan secara konseptual, strategi sering diartikan dengan beragam pendekatan, seperti:

a) Strategi sebagai suatu rencana

Strategi merupakan pedoman atau acuan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, demi tercapainya suatu tujuan-tujuan yang ditetapkan. Dalam hubungan ini, rumusan strategi senantiasa memperhatikan kekuatan, kelemahan, serta peluang dan ancaman yang dilakukan oleh pesainya.

b) Strategi sebagai kegiatan

Sebagai sesuatu kegiatan, strategi merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh setiap individu, organisasi, atau perusahaan untuk memenangkan persaingan, demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau telah ditetapkan

c) Strategi sebagai kegiatan

Modernisasi melalui melalui penajaman arah perubahan struktur sosial ekonomi (termasuk di dalamnya kesehatan), budaya dan politik yang bersumber pada partisipasi masyarakat.

Dengan demikian pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan dengan strategi yaitu, menyusun instrumen, pengumpulan data, membangun pemahaman, komitmen, mempersiapkan sistem informasi, mengembangkan sistem analisis, intervensi, monitoring, dan evaluasi pemberdayaan individu, keluarga dan pendidikan, hal ini untuk, untuk tercapainya kegiatan pemberdayaan tersebut dengan baik, dan sesuai apa yang kita harapkan.

7. Komponen pemberdayaan masyarakat

Komponen pemberdayaan menurut Nugroho (2014, hlm.1-4) Komponen utama yang harus ada dalam proses pemberdayaan masyarakat, yaitu: 1). Survei untuk mengestrak data dan informasi yang dapat digunakan sebagai pedoman perencanaan strategis sesuai dengan kebutuhan. Metode yang tersedia meliputi *participatory rural assessment*, (PRA), *focus group discussion* (FGD), dan *benchmark* (survei dasar), 2). Pelatihan kompetensi individu (pengembangan kapasitas), 3) kolaborasi dan inovasi, 4) pemangku kepentingan dan pendampingan bekerja dengan aparat pemerintah yang tinggal dan bersentuhan langsung dengan

masyarakat untuk memfasilitasi diskusi dan pelaksanaan pemberdayaan harus merupakan kombinasi unsur LSM. 5) menjadi masukan untuk memodifikasi dan meningkatkan kegiatan pemberdayaan agar pelaksanaan kegiatan pemberdayaan efektif, efisien dan partisipatif serta monitoring dan evaluasi.

8. Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Suhendra (2006. Hlm, 86) terdapat beberapa indikator masyarakat yang berdaya, antara lain: (1) Mempunyai kemampuan menyiapkan dan menggunakan pranata dan sumber-sumber yang ada di masyarakat, (2) Dapat berjalan “bottom up planning”, (3) Kemampuan dan aktivitas ekonomi, (4) Kemampuan menyiapkan hari depan keluarga, (5) Kemampuan menyampaikan pendapat dan aspirasi tanpa adanya tekanan. Oleh karena itu, masyarakat yang berdaya akan mampu dan kuat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, mampu mengawasi jalannya pembangunan dan juga menikmati hasil pembangunan.

Indikator keberdayaan Menurut Widjajanti (2011, hlm. 18) adalah daya, kekuatan atau kemampuan suatu masyarakat untuk mengenali potensi, masalah, dan secara mandiri menentukan alternative pemecahannya. Pemberdayaan masyarakat diukur dalam tiga dimensi: a) kemampuan mengambil keputusan, b) kemandirian, c) kemampuan menggunakan usaha untuk masa depan.

10. Indikator Keberdayaan

Indikator keberdayaan adalah suatu ukuran untuk dapat menilai apakah suatu pemberdayaan telah berhasil dilaksanakan ataukah masih perlu adanya peninjauan ulang. Edi Soeharto, (2014:hlm.64) menyimpulkan bahwa terdapat indikator keberdayaan meliputi:

1) Kebebasan Mobilitas.

Kemampuan individu untuk bergerak keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.

2) Kemampuan Membeli Komoditas Kecil.

Kemampuan untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari seperti sembako, kebutuhan dirinya. seseorang dianggap mampu melakukan kegiatan ini jika mampu membeli dengan uangnya sendiri tanpa harus meminta ijin ataupun kesanggupan kepada orang lain.

3) Kemampuan Membeli Komoditas Besar.

Kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti kursi, alat elektronik, perabotan rumah tangga lainnya. Sama halnya dengan poin di atas seseorang dianggap mampu melakukan kegiatan ini jika mampu membeli dengan uangnya sendiri tanpa harus meminta ijin ataupun kesanggupan kepada orang lain.

4) Terlibat Dalam Pembuatan Keputusan-Keputusan Rumah Tangga

Mampu Membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian aset dan kredit usaha.

5) Kebebasan Relatif Dari Dominasi Keluarga.

Hal ini berkaitan dengan bahwa seseorang harus terbebas dari dominasi, kekangan, ataupun paksaan dari pihak lain terhadap dirinya sendiri dalam menentukan pilihan hidupnya.

Mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan; seorang anggota DPRD setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum hukum waris.

6) Keterlibatan dalam Kampanye dan Protes-Protes

Seseorang dianggap 'berdaya' jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya, terhadap suami yang memukul istri.

Keberhasilan pemberdayaan yang telah dipaparkan di atas jika ditarik kesimpulan maka menyangkut dengan peningkatan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, serta kemampuan kultural dan politis individu. Hal ini dapat dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan yang dikemukakan oleh Edi Suharto (2014:hlm.65) kemudian dipaparkan sebagai berikut:

1. Kekuasaan Dalam (*power within*)

Kesadaran dan keinginan untuk berubah, meliputi keinginan untuk berperan dalam aktif dalam mengembangkan pariwisata, Keinginan untuk mengembangkan potensi diri dan partisipasi aktif di dalam pengelolaan BUMDESA.

2. Kekuasaan Untuk (*power to*)

Kemampuan meningkatkan kapasitas untuk memperoleh akses meliputi bertambahnya pengetahuan dan keterampilan, kemudahan dalam perolehan kesempatan-kesempatan kredit serta kemudahan bekerjasama dengan lembaga-lembaga eksternal atau lembaga perusahaan guna meningkatkan kapasitas diri.

3. Kekuasaan Atas (*power over*)

Kemampuan menghadapi hambatan meliputi terpenuhinya kebutuhan hidup, perubahan dan kepemilikan aset, adanya perubahan peran di dalam keluarga, serta peran dan keterlibatan di dalam masyarakat.

4. Kekuasaan Dengan (*power with*)

Kemampuan kerja sama dan solidaritas meliputi Adanya kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pariwisata, adanya solidaritas terhadap sesama anggota kelompok, mampu mengatasi hambatan dalam pengelolaan pariwisata.

11. Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat.

Mathews dalam Mardikanto (2019, hlm. 105) mengatakan bahwasanya prinsip adalah “suatu pernyataan tentang kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten”. Karena itu, prinsip dapat dijadikan sebuah landasan utama dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, berlaku umum, dapat diterima secara menyeluruh, dan telah diyakini kebenarannya dari berbagai analisis dalam kondisi yang beragam. Dengan demikian dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, prinsip harus dijadikan sebuah landasan pokok dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Mardikanto (2019. Hlm, 105-106) mengatakan Pemberdayaan mempunyai prinsip-prinsip. 1), mengerjakan, artinya kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan sesuatu. Karena melalui mengerjakan mereka akan berproses belajar. Baik dengan menggunakan pikiran,

perasaan, dan keterampilan yang akan terus di ingat dalam waktu panjang. 2). Akibat artinya kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik dan mangfaat. Karena, pikiran, perasaan senang/puas atu kecewa akan mempengaruhi proses kegiatan belaja/ pemberdayaan di masa-masa yang akan datang. 3). Asosiasi artinya, setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya, sebab setiap orang cenderung untuk mengaitkan kegiyatanya dengan pristiwa yang lainnya. Misalnya, dengan melihat cangkul orang diingatkan kepada pemberdayaan tentang persiapan lahan yang baik; melihat tanaman yang subur, akan mengingatkanya kepada usaha-usaha pemupukan, dll.

Prinsip-prinsip Pemberdayaan masyarakat Ada tiga prinsip dalam islam untuk berpegang teguh dan mendorong pemberdayaan masyarakat yang harus diperhitakan. Prinsip *ukhuwwah*, Prinsip *ta'awun*, dan Prinsip persamaan derajat.

Menurut Arsiyah (2009, hlm. 374) penelitiannya meyebutkan bahwa ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat: hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal meliputi: 1) keterbatasan sumber daya manusia. 2) ketersediaan bahan baku 3) keterbatasan keterampilan manajemen, 4) kurangnya kemampuan mengelola peluang pasar yang ada, dan keterbatasan penggerak. Disisi lain hambatan eksternal meliputi: 1) rendahnya akses kelompok usaha masyarakat (KBU) sebagai mitra pemerintah sebagai jembatan anantara, pemerintah dan pengusaha, dan 2) upaya penguatan usaha-usah, tidak ada badan swasta untuk memberikan dukungan modal.

Sementara Shardlow (1998) dalam Theresia Aprilia (2014, hlm. 85) mengatakan bahwa “pemberdayaan membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka” Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi sekarang telah banyak diterima bahkan telah berkembang dalam berbagai literatur di dunia barat.

Berdasarkan definisi menurut para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasanya pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses masyarakat untuk berdaya ataupun mandiri, baik berdaya dalam kempuan baik dalam keterampilan dalam pemberdayaan mempuyai prinsip dalam islam yaitu: prinsip *ukhuwah*,

prinsip *ta'wun*, dan prinsip kesamaan atau kesetaraan untuk terwujudnya tujuan bersama, dalam pemberdayaan mempunyai tujuan. Tujuannya masyarakat mampu mengembangkan kemampuan dan keterampilan untuk meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

13. Pemberdayaan Masyarakat melalui Ekonomi Kreatif

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi masyarakat ini merupakan program dari pemerintah untuk meningkatkan perekonomi masyarakat dan desa dalam meningkatkan UKM, industri rumah tangga, BUMDESA, kelompok tani, pasar, serta menunjang ekonomi masyarakat lainnya. Bentuk dari pemberdayaan masyarakat ini berupa pelatihan, woksop, pemodal/pemodalan, bantuan alat produksi, peningkatan sarana prasaran, dengan demikian adanya pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi diharapkan dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat dalam hal ini, merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang mengandung nilai-nilai sosial karena pemberdayaan merupakan suatu upaya yang harus diikuti dengan tetap memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh setiap masyarakat.

Menurut sumodiningrat dalam Saputra (2017, hlm. 24), mengatakan kebijakan pemberdayaan masyarakat secara umum dapat dibagi menjadi dibagi tiga kelompok, pertama kebijakan yang secara langsung mengarah pada tujuan tetapi memberikan landasan untuk menciptakan suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat, kedua. Langkah-langkah yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran, ketiga. Tindakan khusus menjangkau masyarakat miskin melalui upaya khusus. Maka, pemberdayaan masyarakat erat sekali kaitannya dengan masalah ekonomi dan kesejahteraan. Seiring berjalannya waktu dan pesatnya perkembangan zaman perkembangan ekonomi pun sudah pada taraf ekonomi kreatif.

Menurut Purnomo (2016, hlm. 7) ekonomi kreatif adalah suatu konsep untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berbassis kreativitas. Pada zaman penciptaan, nilai ekonomis produk dan jasa tidak lagi ditentukan oleh bahan baku dan sistem produksi seperti kreasi inovasi melalui pengembangan teknologi yang

lebih mau dan sebelumnya ditentukan. Telah diketahui bahwa pada zaman serba teknologi ini maka untuk mampu bersaing secara global dibutuhkan inovasi, dan kreativitas yang tinggi sehingga dapat menghasilkan ide-ide cemerlang dalam meningkatkan ekonomi.

Selanjutnya, menguti dari Cetak Biru Ekonomi Kreatif 2025 dalam Purnomo (2016:8) terdapat 3 hal pokok yang menjadi dasar dari ekonomi kreatif, antara lain:

1) Kreativitas

Dapat dijabarkan sebagai suatu kapasitas atau kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan suatu yang unik, fresh, dan dapat diterima umum.

2) Inovasi

Suatu transformasi dari ide atau gagasan dengan kreativitas dengan memanfaatkan penemuan yang sudah ada untuk menghasilkan suatu produk ataupun proses yang lebih baik, bernilai tambah, dan bermanfaat.

3) Penemuan

Istilah ini lebih menekankan pada menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya dan dapat diakui sebagai karya yang mempunyai fungsi yang unik atau belum pernah diketahui sebelumnya.

Berdasarkan hal di atas, maka ekonomi kreatif dapat mendorong dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Dengan ide atau gagasan baru yang dikembangkan oleh masyarakat tentunya dapat membangun ekonomi secara berkelanjutan. Dengan demikian, kesejahteraan dan ekonomi keluarga masyarakat pun dapat dikelola dengan baik, karena jika pada suatu desa memiliki ekonomi yang baik maka akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Begitupun juga pada pemberdayaan masyarakatnya, apabila suatu desa memperhatikan secara rinci potensi yang dimiliki setiap masyarakat dan setiap daerah maka dengan dilakukan pemberdayaan masyarakat secara baik dan berkala dapat menunjang berbagai kegiatan yang mampu meningkatkan ekonomi.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Nursetiawan (2018, hlm. 76) Ia mengatakan definisi BUMDesa tentang pembangunan pendesaan membutuhkan strategi dan keterlibatan masyarakat desa setempat. Salah satu bentuk pembangunan dan pemberdayaan di pendesaan adalah

dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Pada hakikatnya BUMDesa didirikan dan diatur dengan prinsip kebersamaan dan kegotongroyongan yang diikuti dengan semangat kekeluargaan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 89 UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, dan fungsi pembentukan BUMDesa adalah sebagai berikut. (B) Pencapaian tujuan perorangan. Perubahan global dan dinamika kehidupan manusia menuntut manusia untuk dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Jika kita tidak dapat beradaptasi untuk mengubah diri kita sendiri, kita akan mengalami kemunduran dan bahkan tidak akan membuat kemajuan.

Sudrajat (2020, hlm. 73) Mengatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa (atau diakronimkan menjadi (BUMDesa) merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. kepengurusan badan usaha milik desa terdiri dari Pemerintah desa dan masyarakat desa setempat, badan usaha milik desa atau biasa disingkat dengan BUMDesa dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa.

Tujuan awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat Istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di kelola oleh masyarakat melalui program atau proyek Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 : a). Pasal 87 ayat (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa; ayat (2) BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan; (3) BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

b). Pasal 88 ayat (1) Pendirian BUMDesa disepakati melalui Musyawarah Desa; ayat (2) Pendirian BUMDesa (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pasal 89 hasil usaha BUMDesa dimanfaatkan untuk: a) mengembangkan usaha dan Pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat

miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja desa.

b). Pasal 90 Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUMDesa dengan: memberikan hibah dan/atau akses permodalan, melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan, memprioritaskan BUMDesa dalam pengelolaan sumber daya alam di desa.

Dari definisi mengenai pengertian BUMDesa yang di kemukakan oleh para ahli, Maka dapat disimpulkan bahwa BUMDesa adalah usaha milik desa yang mempunyai unit usaha agar Desa bisa berperan mandiri dalam membangun ekonomi Desa, mendorong masyarakat meningkatkan pendapatan masyarakat supaya masyarakat bisa sejahtera, didirikan dan dikelola oleh masyarakat dengan asas kebersamaan, gotong royong yang diikuti semangat kekeluargaan.

Ekonomi Keluarga

1. Pengertian Ekonomi Keluarga

Ekonomi keluarga sangatlah penting karena berkaitan dengan sejahtera atau tidaknya sebuah keluarga. Sejahtera atau tidaknya sebuah keluarga dapat dilihat dari pengeluaran dan pemasukkan yang dialami oleh suatu keluarga. Maka, dalam hal ini, ekonomi keluarga berkaitan dengan upaya yang dilakukan manusia untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya baik berupa barang ataupun jasa sehingga memberikan kepuasan dan kebahagiaan dalam dirinya.

Rohmah (2017, hlm. 121-122) mengatakan istilah "ekonomi" sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu οἶκος (oikos) yang berarti "keluarga, rumah tangga" dan νόμος (nomos) yang berarti "peraturan, aturan, hukum". Maka ekonomi dapat diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga.

Oktovian et al. (2020, hlm. 107) menjelaskan bahwa ekonomi keluarga dapat diartikan keadaan atau kedudukan (orang, badan) dalam berhubungan dengan masyarakat di sekelilingnya. Ekonomi berarti urusan keuangan rumah tangga (organisasi, lembaga) di masyarakat.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ekonomi keluarga merupakan suatu kajian ilmu yang berkaitan dengan

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar seseorang seperti sandang, pangan, dan papan.

Dalam konteks keluarga, paling tidak ada dua aspek permasalahan ekonomi yang dihadapi, yaitu penghasilan yang selalu kurang dan pengeluaran yang selalu bertambah. Setiap keluarga pun tentunya memiliki kondisi ekonomi yang berbeda. Dalam Oktovian et al. (2020, hlm. 110) mengatakan bahwa kondisi ekonomi keluarga yang berbeda-beda dalam bermasyarakat mengakibatkan munculnya beberapa lapisan ekonomi yang berbeda dalam masyarakat tersebut, yaitu ekonomi keluarga mampu, ekonomi keluarga sedang dan ekonomi keluarga kurang mampu. Untuk lebih jelasnya pemahaman masing-masing kondisi ekonomi dijabarkan di bawah ini:

1) Ekonomi Keluarga Mampu

Keluarga mampu atau lebih sering dibilang lapisan atas pada masyarakat tertentu juga diistilahkan lapisan elit. Dan biasanya lapisan golongan atas merupakan golongan kecil dalam masyarakat dan juga mengendalikan masyarakat. Kekayaan dapat dijumpai dalam masyarakat ini dan dianggap sebagai hal yang wajar.

2) Ekonomi Keluarga Sedang

Status golongan ini dapat hidup di tengah-tengah masyarakat yang bermacam-macam. Golongan ini seseorang tidak berlebihan di dalam membelanjakan hartanya juga tidak kekurangan di dalam mencukupi kebutuhan keluarganya. Status mereka dapat berkomunikasi baik dengan status di atasnya maupun status di bawahnya. Pada tingkatan ini jarang ditemui masalah yang menonjol dalam berkomunikasi dengan status lainnya.

3) Ekonomi Keluarga Kurang Mampu

Status yang kebanyakan melekat pada masyarakat pedesaan atau pemukiman masyarakat yang tertinggal dan berdampak pada kehidupan sehari-hari terutama untuk pendidikan dan mencukupi kebutuhannya.

Kondisi ekonomi keluarga yang berbeda-beda seperti dijelaskan di atas disebabkan karena tingkat penghasilan atau pendapatan setiap orang yang berbeda.

Selain itu, setiap orang pun pastinya memiliki tingkat kebutuhan yang berbeda. Namun, masalah besar kecilnya penghasilan seseorang sebenarnya bersifat table3030e dan tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur makmur atau tidaknya sebuah keluarga. Dalam hal ini, banyak keluarga yang memiliki penghasilan yang besar namun masih tetap merasa kekurangan sehingga harus berhutang. Ada pula keluarga yang emiliki penghasilan kecil namun sudah merasa cukup dan tidak memiliki hutang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi keluarga yang sehat tidak ditentukan oleh banyaknya penghasilan (uang), melainkan ditentukan oleh kemampuan keluarga tersebut mengelola keuangan dan mengendalikan pengeluarannya.

Menurut Musbikin (2019, hlm. 104) menjelaskan bahwa pengelolaan ekonomi rumah tangga yang realistis pada dasarnya menyangkut sikap mental, yang table30 dari cara bertindak ekonomis, hemat, tepat guna dan berencana rela bekerja dan bersedia mengubah pola hidup boros dan masa bodoh. Untuk itu, agar dapat memiliki ekonomi yang baik sehingga dapat memenuhi segala kebutuhan diperlukan adanya kemampuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap individu.

2. Indikator Ekonomi Keluarga

Menurut Musbikin (2019, hlm. 104) menjelaskan bahwa pengelolaan ekonomi rumah tangga yang realistis pada dasarnya menyangkut sikap mental, yang nampak dari cara bertindak ekonomis, hemat, tepat guna dan berencana, rela bekerja dan bersedia mengubah pola hidup boros dan masa bodoh. Dengan kata lain, mampu mengatur ekonomi keluarga berarti:

1. Mampu mengatur pengeluaran sesuai dengan keadaan keuangan yang ada dan rencana atau anggaran yang telah disusun;
2. Mampu mengadakan pilihan atau seleksi atas kebutuhan-kebutuhannya, mana yang betul-betul dibutuhkan saat ini maupun saat mendatang, mana yang tidak atau kurang mendesak;
3. Mampu mengadakan tabungan untuk merealisasikan keinginan serta kebutuhan di masa mendatang yang sudah diencanaakan;

4. Mampu mengatur keuangan sedemikian rupa sehingga tidak terjebak hutang atau membeli secara kredit;
5. Mampu menentukan target serta menyusun program kerja dan anggaran.

Selanjutnya, menurut Musbikin (2019, hlm. 107) menyebutkan bahwa terdapat beberapa hal yang perlu di perhatikan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dalam rumah tangga antara lain:

1. Mengurangi pemborosan dengan melakukan penghematan
2. Berusaha menabung
3. Meningkatkan rasa tanggungjawab bersama terhadap kebutuhan keluarga
4. Berusaha mencari tambahan penghasilan.

Kajian Yang Relevan

1. Budi Rasmianto Berutu, M. Arif Nasution, Heri Kusmanto, Abdul Kadir, 2020. **Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Mungkur Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat.** Hasil Penelitian ini melaporkan bahwasanya peran badan usaha milik desa penguatan masyarakat di desa mungkur memiliki dua program unit usaha pengelolaan penjernihan air dan pengelolaan fasilitas pesta dari kedua program ini penguatan masyarakat desa mungkur. Faktor pendukung optimalisasi fungsi BUMDesaa Mungkur Nciho dalam setiap program adalah: Pertama, kebutuhan masyarakat pada aspek kebutuhan dasar. Kedua, pengurangi pengangguran. Ketiga, optimalisasi lahan desa untuk menunjang perekonomian warga. Yang membedakan penelitian saya dengan ini adalah metode penelitian yang berbeda kalau saya menggunakan metode penelitian kuantitatif. Serta indikator pemberdayaan masyarakat melalui program BUMDESA untuk meningkatkan ekonomi keluarga.
2. Dewi Kirowati, Dan Lutfiyah Dwi S. 2018, **Pengembangan Desa Mandiri Melalui BUMDesa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus : Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten**

Magetan). Hasil penelitian ini melaporkan bahwasanya Pengembangan badan usaha milik desa (BUMDesa) manfaatnya dapat dirasakan oleh warga Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan yaitu Menciptakan usaha baru, Penyerapan tenaga kerja, Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan memberikan dampak langsung terhadap ekonomi pedesaan dan budaya masyarakat. Dan Peran modal sosial dalam pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDesa) yang meliputi kepercayaan. Yang membedakan dengan penelitian saya yaitu pengaruh BUMDesa terhadap pembangunan pemberdayaan masyarakat.

3. Andriani Sari, 2017. **Pengaruh BUMDesa Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa Di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai**. Hasil penelitiannya melaporkan bahwasanya mengenai Pengaruh BUMDesa Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa di Kecamatan Perbaungan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, Hasil uji statistik menunjukkan 0,000 maka (Sig. 0,000 < α toleransi 0,05). Dengan demikian diperoleh hasil yaitu H_0 ditolak yang menjelaskan bahwa terdapat perbedaan sebelum dan sesudah adanya BUMDesa yang dihitung berdasarkan pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah adanya BUMDesa artinya berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi desa di Kecamatan Perbaungan, dan Pengelolaan BUMDesa sudah dikelola dengan baik berdasarkan Peraturan Desa demi mensejahterakan masyarakat desa di Kecamatan Perbaungan. Perbedaan dengan penelitian saya yaitu pengaruh BUMDesa terhadap pembangunan pemberdayaan masyarakat.
4. Dedi Iskanto. Risman. Abuzar Alwifari, 2018 **Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Di Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)**. Hasil penelitiannya melaporkan bahwasanya. Berdasarkan dari hasil penelitian ini diperoleh beberapa kesimpulan yang di sajikan secara ringkas adalah. Variabel kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah pada BUMDesa Mitra Baru sudah baik dibuktikan dengan jawaban responden yang menjawab setuju untuk kedua variabel ini, Dari hasil uji parsial (uji t),

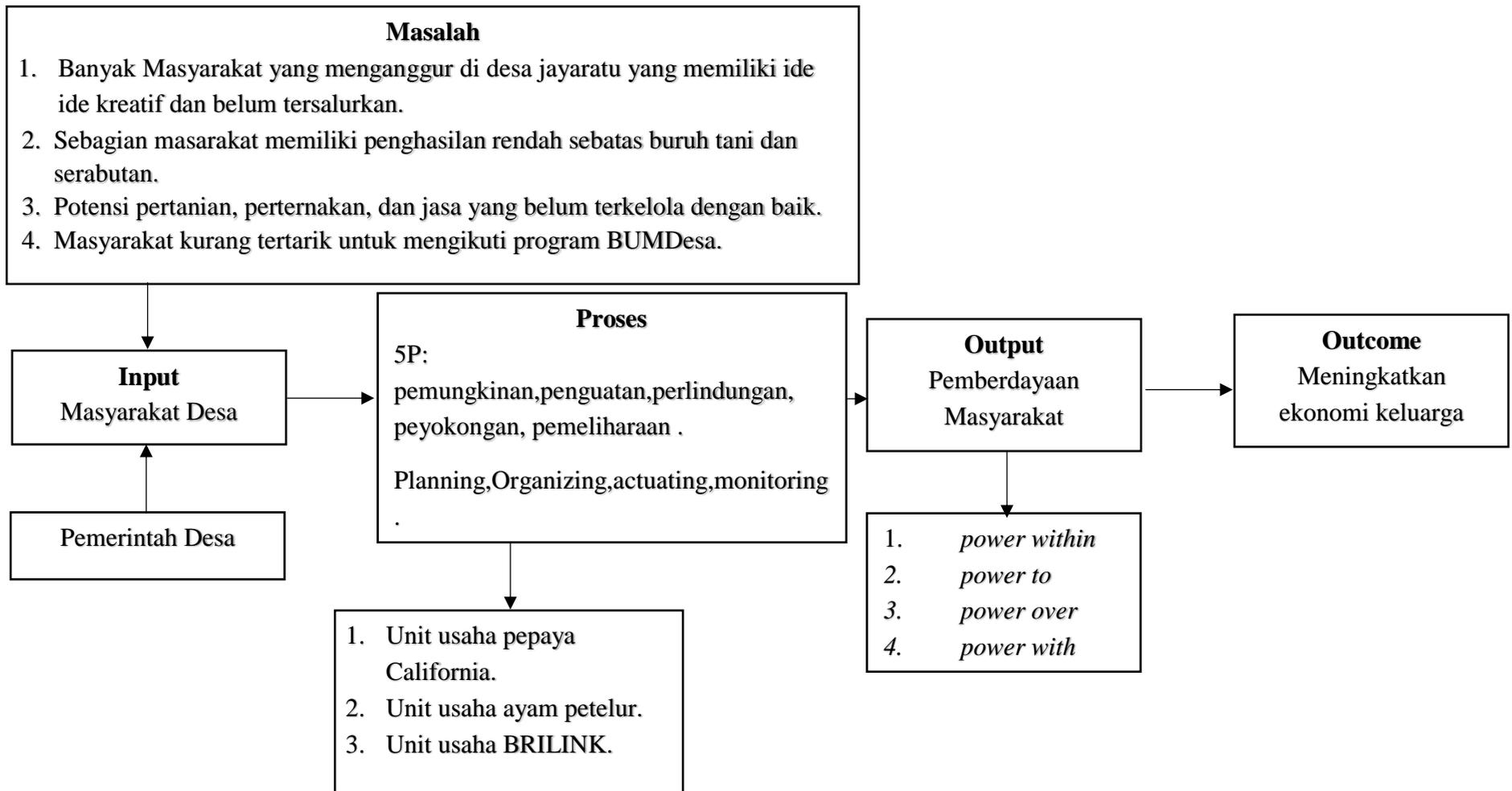
nilai t yang diperoleh tersebut signifikan dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($7,092 > 2,00758$) dengan signifikansi ($0,000 < 0,05$), maka H_0 ditolak. Maka, Ini berarti variabel kualitas pelayanan (X) berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan nasabah (Y) pada BUMDesa Mitra Baru. Pada pengujian koefisien determinasi (R^2), didapat nilai R Square (R^2) sebesar $0,497$, berarti hubungan antara variabel bebas (kualitas pelayanan) terhadap variabel terikat (kepuasan) sebesar $49,7\%$. Sedangkan sisanya $50,3\%$ dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

5. Penelitian skripsi. Ahmad Rafica.Ma, 2020 **Pengaruh Program BUMDesa Terhadap Ekonomi Masyarakat Di Desa Koto Masjid Kecamatan Xiii Koto Kampar**. Hasil penelitiannya melaporkan bahwasanya Ada pengaruh program BUMDesa terhadap variabel Y (Ekonomi Masyarakat) Ekonomi Masyarakat Desa Kotomasjid, Program XIII). Koefisien korelasi sebesar $0,783$ yang menunjukkan bahwa data tersebut memiliki pengaruh yang kuat terhadap perekonomian daerah. Hipotesis dengan uji- t Hasil pengujian hipotesis diperoleh t_{hitung} sebesar 34.523 dan t_{tabel} sebesar $0,275$, dan berdasarkan keputusan tersebut, jika t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} maka hipotesis yang diajukan peneliti diterima. Dampak program BUMDesa terhadap perekonomian masyarakat Desa Kotomasjid Kecamatan 13 Kotokamper dihitung sebesar $78,3\%$. Perbedaan dari penelitian saya saat ini adalah dampak program BUMDesa terhadap bangunan pemberdayaan.

Kerangka Konseptual

Kerangka konsep menjelaskan bahwa penelitian ini adalah. Kemiskinan menjadi hambatan bagi ekonomi keluarga. Karena, kurangnya keterampilan khusus untuk bersaing dalam dunia kerja, tidak mempunyai modal untuk beriwusaha, pendidikan yang rendah, kurangnya keterampilan. Maka dari itu pemerintah desa mempunyai program yang dikelola oleh masyarakat desa tersebut yang bernama Badan usaha milik desa (BUMDesa). Merupakan salah satu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat menganut asas gotong royong dan mandiri. Hal ini berarti memenuhi modal usaha BUMDesa harus bersumber dari masyarakat. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan BUMDesa

dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). Melalui program pemerintah, BUMDesa Jayaratu memiliki tiga program yang berpotensi di wilayah desa tersebut ialah : di bidang pertanian mengelola pepaya California, dibidang perternakan mengelola ayam petelur, dan dibidang jasa mengelola Brilink, proses dari program ini yaitu masyarakat desa yang menjalankan suatu program BUMDesa ini, output dari program BUMDesa ini menghasilkan pemberdayaan masyarakat supaya masyarakat bisa mandiri, menghasilkan perubahan kemandirian ekonomi, perubahan pola pikir, dan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam hal ini diharapkan menghasilkan perubahan yang positif bagi masyarakat desa Jayaratu dalam meningkatkan ekonomi keluarga.



Gambar 2. 1
Kerangka Konseptual

Berdasarkan gambar di atas, kerangka konseptual terdiri dari input, proses, output, dan outcome. Input data dalam penelitian ini yaitu masyarakat desa yang berperan sebagai orang yang diberdayakan oleh pemerintah desa, proses yaitu dengan melalui berbagai program diantaranya ada 3 program yaitu unit usaha pepaya California, unit usaha ayam petelur dan unit usaha brilink. Yang dikelola oleh masyarakat desa jayaratu, output dari penelitian menghasilkan perubahan kemandirian ekonomi, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan outcome yaitu meningkatkan ekonomi keluarga.

Pertanyaan Penelitian

Adapun yang akan dijadikan pertanyaan penelitian adalah bagaimana proses pemberdayaan masyarakat melalui program BUMDesa dalam meningkatkan ekonomi keluarga di Desa Jayaratu, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya?

